

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andhyka Martha, M. Citra Ramadhan & Rizkan Zulyadi. Implementasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*. Vol 5, No. 2, 2022.
- Abu Rohmad. *Paradigma Resolusi Konflik Agaria*. Semarang: Walisongo Press. 2008.
- AP. *Parlindungan, Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*. 2010
- Bambang Sutiyo. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media. 2008
- B. F Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan (Dalam Hukum Tanah Indonesia)*, Jakarta: PT Toko Gunung Tbk, 2005.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, Jakarta: Rajawali, 1989.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201
- H. Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni Bandung, 1980
- H. R. Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* Bandung: Alumni, 2002
- Ida Nurlinda. *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

- Jimmy Joses Sembiring, Panduan Mengurus Sertipikat Tanah, Jakarta: Visi Media, 2010
- Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso dan Irawati. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin. Notarius. Vol. 13, No.2. 2020
- Karta Sapoeta , Pembahasan Hukum Benda Hipotek Hukum Waris, Jakarta : Bumi Aksara, 1994
- Kuswanto, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan Atas Sebidang Tanah di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus, Jurnal Akta, Vol. 4, No.1, 2017
- Maidin Guktom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, (dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia), Bandung: Refika Aditama, 2008
- Mudjiono. Hukum Agraria. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1992
- Maria S.W. Sumardjono, dkk. Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan). Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2008
- Maria S.W. Sumardjono. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2008
- Oemar Moechthar, Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Pahlefi. Analisis Bentuk-Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Bidang Agraria. Majalah Hukum Forum Akademika, Vol. 25. 2014.
- Purnadi Pubacaraka, Sendi-sendi Hukum Agraria, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017
- Poerwadarminta W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta. 1976
- Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung: Alumni, 1999.
- Salim HS. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.

Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Sorjono Soekamto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali pers, 2012

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Surayin. (2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bandung: Yrama Widya

Teguh Soedarsono, Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Ilegal Logging, jurnal Hukum No.1 Vol. 17 Januari 2010

Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang – Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Perpres No. 10 tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Keputusan Kepala BPN RI No. 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan